

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PERJUDIAN BOLA ONLINE**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:
184/Pid.B/2018/PN.Btm)**

SKRIPSI

Oleh:
Fatchur Rohim
(C93215102)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
SURABAYA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatchur Rohim
NIM : C93215102
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan
Perjudian Bola *Online* (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Batam Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Maret 2020

Saya yang menyatakan



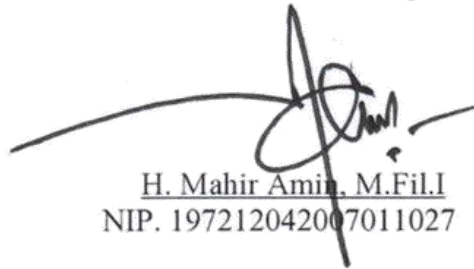
Fatchur Rohim
NIM. C93215102

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Perjudian Bola *Online* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:184/Pid.B/2018/PN.Btm)” yang ditulis oleh Fatchur Rohim, NIM C93215102, ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 14 Februari 2020

Dosen Pembimbing




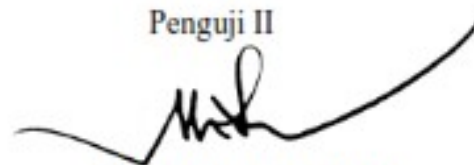
H. Mahir Amin, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

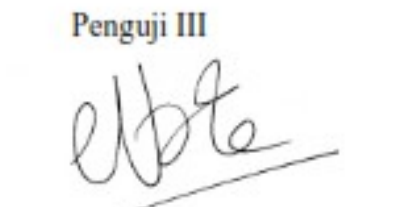
PENGESAHAN

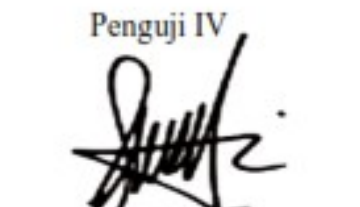
Skripsi yang ditulis oleh Fatchur Rohim NIM. C93215102 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Jum'at 20 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

H. Mahir Amin, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

Penguji II

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

Penguji III

Hj. Nabiela Naili, S.SI., M.HI
NIP. 198102262005012003

Penguji IV

Ahmad Safiudin R., MH
NIP.199212292019031005

Surabaya, 20 Maret 2020
Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,


Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fatchur Rohim
NIM : C93215102
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : Fatqurroqim7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

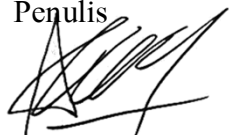
**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PERJUDIAN
BOLA ONLINE (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:
184/Pid.B/2018/PN.Btm)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Agustus 2020

Penulis


(Fatchur Rohim)

Bab kedua membahas tentang hukuman perjudian *online* dalam hukum Islam. Meliputi: pengertian, hukuman, dan *ta'zīr*.

Bab ketiga mendiskripsikan secara singkat tentang kasus perjudian bola *online*, dasar hukum dan pertimbangan hakim tentang kasus perjudian bola *online*, dan amar putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm tentang perjudian bola *online*.

Bab empat membahas tentang analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tentang perjudian bola *online* yang meliputi analisis terhadap pertimbangan hakim, serta menganalisis tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm tentang perjudian bola *online*.

Bab lima merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah beserta saran-saran.

Selain itu, jaksa penuntut umum juga mengajukan beberapa barang bukti diantaranya 1 (satu) unit handphone Samsung J7 warna putih, 1 (satu) buah id Login wap.sbobetuk.com, 1 (satu) bundel screenshot id login wap.sbobetuk.com dari handphone milik pemain Rudi Alias Yongki, 1 (satu) unit handphone xiaomi redmi warna putih hitam, 1 (satu) unit handphone samsung warna putih, 1 (satu) buah wifi Andromax M2Y, 1 (satu) buah akun login www.agent.ghientchoi.com, 1 (satu) token BCA beserta buku rekening dan atm, 1 (satu) buah atm BCA atas nama Andi, 1 (satu) bundel screenshot Website judi bola *online* www.agent.ghienchoi.com dari handphone milik agent/Bandar atas nama tersangka Aan alias Andi.

Mengenai surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan, terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan 3 (tiga) pasal dakwaan yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum di atas, terdakwa melakukan tindak pidana ini berawal dari terdakwa Aan alias Andi pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018 sekiranya pukul 22.00 WIB, bertempat di depan Mini Market Circle K, Windsor Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang

dengan sengaja melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang ITE. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa tanpa seijin pemerintah pusat atau setempat yang berwenang dengan sengaja mencari keuntungan melakukan permainan perjudian bola *online* dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, yang awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018, sekiranya pukul 22.00 wib terdakwa dan saksi bermain handphone dengan serius sedang bermain perjudian bola secara *online*, selanjutnya terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi bola *online* kepada saksi Rudi alias Yongki dengan cara terdakwa memberikan *username* dan *password* milik terdakwa di situs sbobet.com kepada saksi Rudi alias Yongki dengan fasilitas kredit sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu) atau senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya saksi Rudi alias Yongki membuka situs sbobet.com miliknya dan memasang taruhan pertandingan sepakbola yang sedang berlangsung hari itu dengan memilih salah satu klub bola yang akan bertanding, jika klub bola tersebut menang maka saksi Rudi alias Yongki akan menerima pembayaran secara tunai dari terdakwa sesuai dengan besar taruhan yang dipasang pada pertandingan tersebut. Selanjutnya dalam kategori liga Spanyol, saksi Rudi alias Yongki memasang kredit 300 (tiga ratus) untuk Valencia yang di *voor* 1 (satu) oleh Real Madrid yang secara otomatis dipegang oleh terdakwa

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh penuntut umum telah melakukan suatu tindak pidana.

Penuntut umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh majlis hakim mengaku bernama Aan alias Andi lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitasnya tersebut bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara pidana nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm sehingga dengan demikian maka majlis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- b. Unsur turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud permainan judi atau perjudian adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan atau mempertaruhkan sejumlah

dan saksi Rudi alias Yongki (dilakukan dalam penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bermain handphone dengan serius sehingga team mendekati dan mengamankan keduanya, kemudian team opsional melakukan pengecekan terhadap handphone yang dipegang oleh terdakwa dan saksi Rudi alias Yongki dan ternyata benar handphone mereka melakukan perjudian dalam bentuk *online* dan selanjutnya mereka dibawa ke Polresta Barelang.

Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi bola *online* kepada saksi Rudi alias Yongki dengan cara terdakwa memberikan id dan passwordnya di situs sbobet.com kepada saksi dengan fasilitas kredit sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) jika di uangkan senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Selanjutnya saksi Rudi alias Yongki membuka situs sbobet.com menggunakan handphone miliknya dan memasang taruhan pertandingan sepakbola yang sedang berlangsung pada hari itu dengan memilih salah satu club bola yang akan bertanding, jika club tersebut menang maka saksi Rudi alias Yongki akan menerima pembayaran secara cash dari terdakwa sesuai dengan uang taruhan yang dipasang pada pertandingan tersebut.

Pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018 saksi Rudi alias Yongki memilih Liga Spanyol, pertandingan antara Real Madrid melawan Valencia dengan taruhan sebesar Rp. 300.000 atau kredit 300 untuk club Valencia sehingga terdakwa otomatis memilih club

perkara yang diajukan terhadapnya termasuk memberikan putusan terhadap tindak kejahatan.

Putusan pemidanaan secara umum harus memuat 4 (empat) hal yaitu: kepala putusan, identitas terdakwa, pertimbangan-pertimbangan, dan amar putusan. Secara rinci hal-hal yang harus termuat dalam surat pemidanaan terdapat dalam Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm terdakwa Aan alias Andi dihadapkan dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang bersifat kombinasi, artinya hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu manakah dakwaan yang paling sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan 3 pasal dakwaan yakni Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus yang penulis bahas yakni perjudian bola *online* Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm yang dilakukan oleh terdakwa Aan alias Andi. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur pada Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi “barangsiapa turut main judi dijalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa yang telah memberi izin untuk mengadakan judi itu”.

Berikut beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut:

1. Barangsiapa;
2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum , kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut majelis hakim memutus terdakwa dengan hukuman yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta pertimbangan-pertimbangan lainnya dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Dengan ketentuan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Apabila dikaitkan dengan alat bukti, keterangan terdakwa, serta keterangan saksi. Maka pengertian tindak pidana perjudian bola *online* kurang sesuai jika dikaitkan dengan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP. Tindak pidana perjudian tidak hanya diatur dalam KUHP saja akan tetapi diatur juga dalam pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk mengetahui kesesuaian tindak pidana perjudian yang dimaksud dalam putusan tersebut, maka penulis mencoba menguraikan unsur-unsur dalam Pasal 27 Ayat (2) berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam putusan tersebut.

Terdapat tiga unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 Ayat (2) yaitu:

Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hal tersebut, apabila tetap menggunakan KUHP maka kurang efektif dalam menanggulangi perjudian bola *online*. Oleh sebab itu diperlukan peraturan yang lebih khusus menangani tindak pidana yang tergolong dalam *cyber crime*. Pada sistem hukum pidana Indonesia kita mengenal istilah asas hukum, yang mana asas hukum ini harus dijalankan oleh semua aparat penegak hukum. Apabila tidak dijalankan maka akan membuat produk hukum yang dihasilkan mengalami suatu kesalahan atau yang biasa kita kenal dengan istilah cacat hukum. Maka dari itu dalam menerapkan sebuah hukum aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi asas-asas yang terdapat pada konstruksi hukum kita.

Pembentuk Undang-undang kita telah mengatur tentang suatu kemungkinan perilaku itu memnuhi rumusuan suatu ketentuan pidana yang bersifat umum, akan tetapi pada saat yang bersamaan juga memenuhi ketentuan pidana yang bersifat khusus pula. Kemungkinan seperti itu telah diatur oleh pembentuk Undang-undang dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP yang berbunyi:

Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Dalam hal semacam ini, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP, apabila ketentuan yang disebutkan terakhir itu merupakan ketentuan pidana yang bersifat khusus, dalam arti secara lebih khusus

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan itu).

Dari ayat tersebut dapat kita lihat bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh permainan judi disetarakan dengan bahaya yang ditimbulkan oleh meminum *khamr* (minuman keras) serta berkorban untuk berhala. Bahaya yang ditimbulkan dari bermain judi bisa berupa merusak ekonomi keluarga, mengganggu keamanan masyarakat, melumpuhkan semangat berkreasi, menghabiskan waktu dan lain sebagainya.

Tazir telah disyariatkan terhadap setiap pelanggaran yang ketetapan hukumnya belum ditentukan oleh al-Qur'an maupun hadis. Sedangkan pelanggaran yang sudah ditentukan hukumnya oleh *syara'*, maka penjatuhan hukumannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Oleh karena itu, hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'* ketentuan hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis hukumannya.

Dari paparan di atas, maka dapat dipahami bahwa perjudian dalam bentuk apapun, baik konvensional maupun kejahatan yang dilakukan melalui media internet atau *cyber crime* tidak akan lepas dari hukuman, karena mengganggu ketertiban umum yang sangat dipelihara oleh Islam. Seiring dengan itu di dalam hukum positif dikenal dengan adagium “setiap

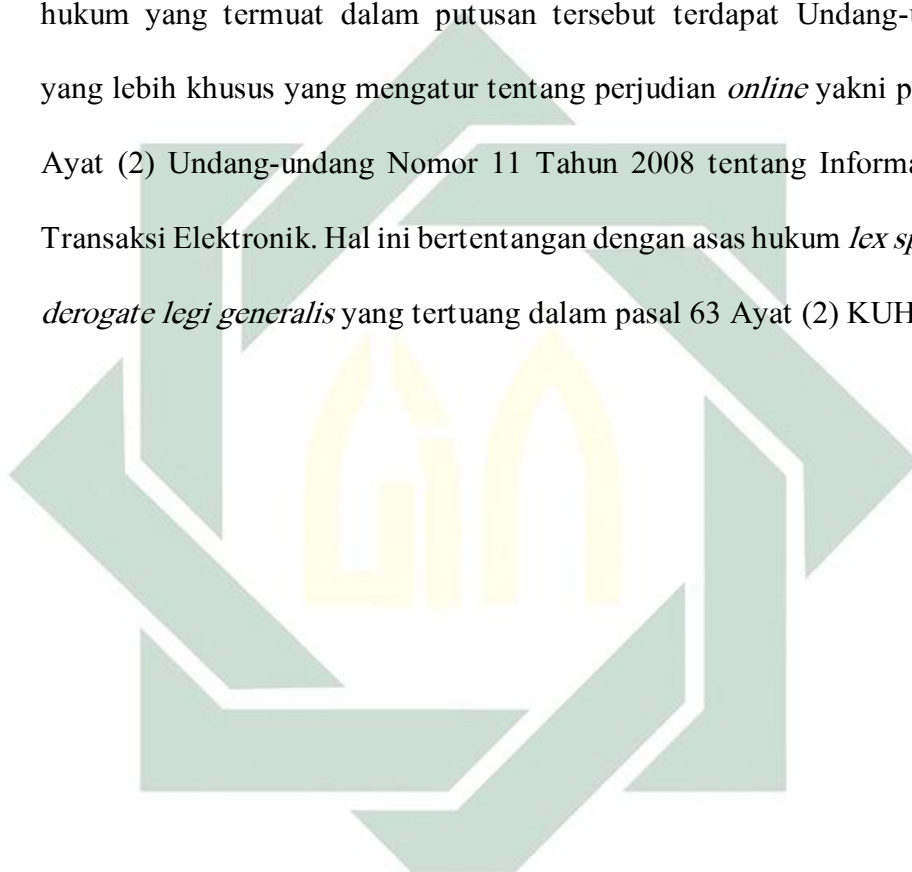
kejahatan tidak boleh dibiarkan berlaku tanpa hukum” (*aut punere aut de dere, nullum crimen sine poena*).

Dengan demikian *cyber crime* atau kejahatan dunia maya dalam hal ini perjudian bola *online* masuk dalam ranah *jarīmah tazīr* bukan termasuk *jarīmah qīsas* ataupun *huddud*. Sebab bisa dipastikan bahwa di zaman Rasulullah belum ditemukan teknologi komputer dan internet seperti zaman ini. Maka dari itu tidak ada satu ayat al-Qur’an ataupun hadis yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi kejahatan dunia maya seperti yang ada di zaman sekarang ini.

Sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam, larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak cukup dengan niat baik saja, akan tetapi harus disertai dengan hukuman. Hukuman itu diancamkan kepada pelaku kejahatan yang pelaksanaannya dapat dijadikan contoh oleh masyarakat agar tidak menegerjakan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, dasar larangan terhadap perbuatan karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat. Dengan demikian, penetapan perbuatan pidana dan hukumnya dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Dalam amar putusan pengadilan negeri Batam nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm terdakwa perjudian bola *online* dihukum dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Jika dikaitkan dalam hukum pidana Islam hukuman tersebut masuk di dalam kategori hukuman *ta’zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang.

Pada putusan perjudian bola *online* yang dilakukan oleh terdakwa Aan alias Andi, penulis menilai bahwa majelis hakim kurang teliti di dalam memutuskan perkara tersebut. Majelis hakim memutus terdakwa dengan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang seharusnya berdasarkan fakta hukum yang termuat dalam putusan tersebut terdapat Undang-undang yang lebih khusus yang mengatur tentang perjudian *online* yakni pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini bertentangan dengan asas hukum *lex specialis derogate legi generalis* yang tertuang dalam pasal 63 Ayat (2) KUHP.



- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Soekamto, Soerono Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2001.
- Sudariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Susanti, Dyah Ochtorina, A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Wahbah, Zuhaili. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira. 2010.

